



PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Terhadap

**PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA,
DI DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN, SOSIAL, BUDAYA
DI KABUPATEN INDRAMAYU**



Penerbit:
CV. EUREKA MEDIA AKSARA
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-0581-64-4



**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA,
DI DALAM PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN, SOSIAL, BUDAYA DI
KABUPATEN INDRAMAYU**

A.Junaedi Karso



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PERKAWINAN ANTAR WARGA
NEGARA, DI DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN,
SOSIAL, BUDAYA DI KABUPATEN INDRAMAYU**

Penulis : A.Junaedi Karso

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Tukaryanto, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5581-64-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, AGUSTUS 2020**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb
bismillahirrohmanirohim

segala puji dan syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas rahmat, taufiq, dan hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku tentang **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perkawinan Antar Warga Negara, di Dalam Pembangunan Perekonomian, Sosial, Budaya di Kabupaten Indramayu”**.

kami mohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perkawinan Antar Warga Negara, di Dalam Pembangunan Perekonomian, Sosial, Budaya di Kabupaten Indramayu”**. kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutip dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, website, media serta sumber lainnya. ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. semoga Allah SWT membalas kebaikan anda-anda semua. selamat membaca dan semoga bermanfaat.

billahit taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Teori Pemerintahan	13
B. Perkawinan Campuran Antar Warga Negara di Kabupaten Indramayu	21
C. Implementasi Kebijakan Perkawinan Campuran	32
D. Sistem Perkawinan Campuran Dalam Implementasi Kewarganegaraan.....	34
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Campuran antar Warga Negara di Indramayu.....	36
F. Prosedur dan Syarat dalam melakukan Pernikahan dengan WNA	40
G. Tatacara Perkawinan Campuran.....	41
H. Problematika dan solusi Perkawinan Campuran	44
BAB 3 METODELOGI PENELITIAN	50
A. Desain Penelitian	50
B. Model Penelitian	50
C. Definisi Operasional Variabel.....	51
D. Populasi dan Sampel	56
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisa Data	59
G. Rancangan Uji Hipotesis	63
H. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	64
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Pemerintah Kabupaten Indramayu.....	65
B. Potret Kabupaten Indramayu	66
C. Keadaan Geografis Dan Topografi Kabupaten Indramayu	73
D. Visi dan Misi Kabupaten Indramayu.....	87
E. Seni dan Budaya Kabupaten Indramayu.....	90
F. Sumber Mata Pencaharian Lainnya	94
G. Keadaan Kekayaan Alam Kabupaten Indramayu	95
H. Implementasi Kebijakan Pemeritah	98

I. Perkawinan antar Warga Negara di Kabupaten Indramayu.....	110
J. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkawinan antar Warganegara di Kabupaten Indramayu.....	117
K. Implementasi Kebijakan Perkawinan.....	125
L. Instansi pemberi izin Pelaksanaan Perkawinan antar Warga Negara.....	131
M. Perkawinan antar Warga Negara di Kabupaten Indramayu.....	134
N. Prosedur dan Syarat Perkawinan Campuran	144
O. Profesionlisme Aparat.....	150
P. Deskripsi Data Hasil Penelitian	155
Q. Analisis Statistik Hasil Penelitian	167
BAB 5 TUJUAN PERSYARAT DAN PROSEDUR PERKAWINAN ANTAR NEGARA DI INDONESIA	186
DAFTAR PUSTAKA.....	202
TENTANG PENULIS	206

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA,
DI DALAM PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN, SOSIAL, BUDAYA DI
KABUPATEN INDRAMAYU**

BAB 1 | PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan antar Warga Negara (Campuran) termasuk masalah **RUMAH TANGGA** yang banyak mengandung persoalan-persoalan sosial yang yuridis demikian menurut Dr.Rebecca Liswood dalam bukunya "**first Aid for The Happy Marriage**" selanjutnya menurut doctor yang berpengalaman dan khususnya diri dalam bidang perkawinan ini, sesuai pengalaman yang dalam bidang tersebut mengatatakan.

"Bahwa sangat sukar sekali menyakinkan generasi muda untuk merenungkan secara hakiki tentang perkawinan dengan berbeda agama dimana mereka senantiasa akan menghadapi persoalan-persoalan yang sungguh menegangkan dan menentukan. Generasi muda senantiasa menolak dan selanjutnya meyakinkan dirinya bahwa cinta akan dapat megatasi segala-galanya"

Selanjutnya Rebecca menyitir ucapan "**Colley Cibber**" yang berbunyi :

"Betapa banyaknya penderitaan yang terdapat dalam lingkaran kecil cincin perkawinan."

Demikian juga antara lain alasan kenapa, Agama Islam yang diturunkan paling akhir bertujuan untuk memberi petunjuk kepada ummat manusia jalan yang lurus yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Karenanya **Agama Islam** ini tidak menyuruh atau menganjurkan sesuatu itu jika tidak akan mendatangkan faedah

BAB 2 | TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pemerintahan

1. Ilmu Pemerintahan

Koswara (1999 : 6) menjelaskan bahwa Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya guna mencapai tujuan negara. Pengertian pemerintah disini dilihat dari aspek statika.

Selanjutnya diuraikan lebih lanjut oleh Koswara (1999:6) bahwa selain pemerintah ada yang dinamakan pemerintahan.

"Pemerintahan bisa diartikan dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan publik yang meliputi bidang-bidang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan badan publik yang hanya meliputi bidang eksekutif saja."

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang cara-cara bagaimana pemerintahan negara disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya mencapai tujuan negara.

Menurut Arthur Mass dalam Koswara, (2001 : 7) hampir di setiap Negara Bangsa (*Nation State*) dalam upaya mencapai tujuan Negara, dianut pembagian kekuasaan :

BAB 3 | METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian pada penelitian ini adalah penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengukur data pokok. Penelitian jenis ini digunakan untuk maksud (1) penjajagan (eksploratif); (2) deskriptif *eksplanatory* dan *confirmatory*, yakni menjelaskan hubungan kausal dari pengajuan hipotesis; (3) evaluasi; (4) prediksi; (5) penelitian operasional; dan (6) pengembangan indikator sosial. Atas dasar tersebut, penelitian ini masuk ke dalam deskriptif *eksplanatory* dan *confirmatory*, karena menggunakan desain, instrumen dan skala pengukuran data yang diakhiri dengan teknik analisis data kuantitatif.

B. Model Penelitian

Sesuai dengan Desain Penelitian yang digunakan, maka model penelitian ini menggunakan model regresi linier sederhana dan berganda seperti yang dijabarkan pada skema di bawah ini :

BAB 4 | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

A. Pemerintah Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Indramayu yang merupakan pusat pemerintahan, sedangkan titik keramaian justru berada di kecamatan Jatibarang dan Haurgeulis, hal ini dikarenakan di Jatibarang terdapat pusat Pasar dan memiliki akses yang mudah seperti Jalur Pantura dan Stasiun Kereta Api, hal yang sama juga terjadi untuk Kecamatan Haurgeulis meski tak dilewati secara langsung oleh Jalur Pantura, namun Kecamatan ini dilalui oleh Jalur Kereta Api. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon di tenggara, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang di Selatan, serta Kabupaten Subang di barat.

Kabupaten Indramayu terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 315 desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Indramayu. Hari jadi Kabupaten Indramayu ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 1527.

Indramayu dilintasi jalur pantura, yakni jalur utama dan terpadat di Pulau Jawa, terutama pada musim mudik lebaran. Kabupaten ini juga dilintasi oleh jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa, dengan salah satu stasiun terbesarnya adalah Stasiun Jatibarang yang berada di kota Jatibarang, sekitar 19 km ke selatan dari pusat Kota Indramayu.

BAB

5

TUJUAN PERSYARAT DAN PROSEDUR PERKAWINAN ANTAR NEGARA DI INDONESIA

Dalam melaksanakan Perakwinaan antar Warga Negara di Kabupaten Indramayu, tentunya tidak terlepas dari Undang-undang Dasar 1945, Perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 57-62), Peraturan Pemerintahan, (PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 2-9); Peraturan Menteri Agama (PMA No. 2 Tahun 1990) dan Peraturan Presiden (Perpres No.25/2008 (Pasal 73);

Adapun salah satu tujuan utama terjadinya Pernikahan antar Warga Negara (WNI) dan WNA) diantaranya karena Kesejahteraan ekonomi, dimana pada umumnya kesejahteraan ekonomi suatu Negara, bangsa dan masyarakat identik sekali dengan tingkat ekonominya yang kuat serta tatanan sosial yang tinggi, hal ini sesuai dengan pendapat Thomas dkk. (2005:15) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

Sejalan dengan uraian diatas, Koentjaraningrat (1983) menyatakan bahwa ada tujuh unsur yang terdapat dalam kebudayaan, yaitu:

1. *Sistem religi dan upacara keagamaan*
2. *Sistem dan organisasi kemasyarakatan*
3. *Sistem pengetahuan*

DAFTAR PUSTAKA

- , 1971 Rebbeca, Liswood First Aid for The Happy Marringae New York.
- Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta
- Alam, Andi Sjamsu, 2006, Usia Ideal untuk Kawin, Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah, Kencana Mas Publishing House, Jakarta
- Ali, Ahmad, 1990, Mengembara di Belantara Hukum, Lembaga Penelitian UNHAS, Makassar
- , 1998, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Yasrif, Watampone Anshari, Endang Saifuddin, 1979, Ilmu, Filsafat dan Agama, Bina Ilmu, Surabaya Anwar, Syamsul, 2000, Epistemologi Hukum Islam, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
- Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, 1985, Cetakan Ke-22, Pradnya Paramita Jakarta
- Asad, M., 1980, The Message of the Quran, Dar al-Andalus, Gibraltar Asy'ari, Musa, 1999, Filsafat Islam, LESFI, Yogyakarta
- Basyir, Ahmad Azhar, 1999, "Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa", dalam Dadan Muttaqien, dkk (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, UII Press, Yogyakarta:
- Daly, Peunoh, 1988, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam, Bulan Bintang, Jakarta
- Koswara, Kertapradja 1999, Teori Pemerintah Daerah, Jakrta Institute Ilmu Pemerintahan Press.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 1995/1996, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Tim Proyek Penyuluhan Hukum Agama, UU No.1 Tahun

- 1974 tentang Perkawinan dan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Departemen Agama RI, Jakarta
- Dyah, Indriaswati, 2000, "Laporan Hasil Penelitian" dalam LBH-APIK, Sejarah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender dalam Perspektif Wanita, LBH-APIK, Jakarta
- Hawari, H. Dadang, 1999, al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta
- sayyid, 1997, Rahasia Pernikahan yang Bahagia, Cetakan I, Pustaka Azzam, Jakarta
- Isa, Abdul Ghalib Ahmad, 1997, Pernikahan Islam, cetakan I, Pustaka Manthiq, Solo Isyad, Syamsuhadi, 2009,
- Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, Disertasi Jaspas,
- , 1976, Pengantar Hukum Internasional, Buku I, Bagian Pertama, Bina Cipta, Bandung
- , 1990, Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta
- Madjid, Nurcholis, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Paramadina, Jakarta
- , 1997, Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat, Paramadina, Jakarta
- Masdar F. Mas'udi, 1995, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, No.3, Vol. VI, Jakarta
- Masud, Muhammad Khalid, 1977, Islamic Legal Philosophy, A Study Of Abu Qardawi, Yusuf, 1996, Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah, Cetakan II, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta

- Sabiq, Sayyid, 1990, *al-Fiqh us-Sunnah*, Darul Fath al-I'laam al-Araby, Kairo,
- Sadzali, Munawir, 1999, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam Dadan Muttaqien, dkk (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta
- Tasrif, S., 1986, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Abardin, Jakarta
- Yunus, KH. Mahmud, 1956, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidayakarya Agung, Jakarta
- BPHN - Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Campuran, Tahun 1992/1993
- BPHN - Penelitian Hukum tentang Permasalahan Hukum dalam Praktek Perkawinan Antar Agama dalam hal Harta Perkawinan, Warisan, dan Status Anak tahun 1993/1994.
- BPHN - Aspek-aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Perkawinan Campuran Tahun 1993.
- Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Status Anak Hasil Perkawinan Antar WNI dan WNA Tahun 2004.

DOKUMEN

- Al-Quran Al-Karim Departemen Agama RI, *Tafsir al-Quran*, Jakarta, 2004; Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 1991;
- Perturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, tentang Tatacara Perkawinan;

Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Keppres No 12 Tahun 1983 Kewenangan Pencatatan Pernikahan;

Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor. 2 Tahun 1990, tentang tentang Tatacara Perkawinan Campuran antar Warga Negara;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006;

Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011;

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2006;

Undang-Undang Perdata BW.

TENTANG PENULIS



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasional tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provision of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North*

Sumatera, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarkan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain *Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty*, (*International Jurnal of Social Science Humanities Research*, 2019); dan *Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency*, (*IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research*, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain *Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia*, (*East African Scholar Journal of Economics*,

business and Management, 2019); *Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand*, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); *Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia*, (Journal L Sociale, 2020); *Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency*, (Journal La Bisecoman, 2020); *Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports*, (South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences, 2020); *Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia*, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets*, (Journal La Sociale, 2020); *The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare*, (International Journal of Mechanical and Production engineeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); *Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex*, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); *Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective*, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); *Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterpreses*, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan *Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing Service*, (Solid State Technology Archives Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju *good governance* of bumdes yang berdasarkan prinsip *government judgement rule* <http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa>, 2021)

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH

Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prouement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, *Dinamika Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, *Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* di LPKN tahun 2020, *Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif* di LPKN tahun 2020, *Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015)* di LPKN tahun 2020, *Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa* di LPKN tahun 2020, *Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM* di BNSP tahun 2020, *Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM* di BNSP tahun 2020, *Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan* di LPKN tahun 2020, *Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi* di LPKN tahun 2020, *Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah)* di LPKN tahun 2020, *Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi* di LPKN tahun 2020, *Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020* di LPKN tahun 2020, *Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020* di LPKN tahun 2020, *Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020* di LPKN tahun 2020, *Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita*

Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awariness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi "*How to Perform While Transform*" di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen

STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppel Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppel Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppel Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.